

## **A. Latar Belakang Masalah**

*“Power in the global information society depends less on territory, military, power, and natural resources. Rather, information, technology, and institutional flexibility have gained importance in international relations. The power of knowledge, beliefs, and ideas are the main tools of political actors in the efforts to achieve their goals.”*

- Boris Trajkovski, Presiden Republic of Macedonia

Perkembangan internet yang semakin canggih membuka ruang untuk semua kalangan dalam memanfaatkan penggunaan media social di berbagai kesempatan. Internet jika digunakan secara bijak mampu menghasilkan hal-hal positif, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga menimbulkan dampak negatif. Penggunaan internet tidak hanya bertumpu pada aktor individu, negara pun dapat memanfaatkan kehadiran internet guna mencapai kepentingan nasional, menggiring opini public, melakukan kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin memudahkan orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia (Wahyudi dan Sukmasari, 2018). Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Menurut Sudarma (2004) Internet secara umum merupakan jaringan kerja yang menggunakan sistem komputer dan internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dikenal dengan program ARPAnet (Advanced Research Project Agency), dan kemudian pada tahun 1973 mulai berkembang ke negara lain khususnya Inggris dan Norwegia. (Nurizzka Annisa Fitrah, 2016)

Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook, Google+ dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Jarak tak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi (Watie Errika Dwi Setya, 2011). Internet dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencapai kepentingan tertentu, bagi negara internet dapat dijadikan sebagai salah satu instrument soft power dalam melakukan praktek diplomasi.

Twiplomacy adalah salah satu instrumen soft power dimana jejaring sosial media digunakan sebagai alat diplomasi publik, dengan bantuan dari jaringan ini, lembaga negara, pejabat, individu dan organisasi mampu mengimplementasi pengetahuan tertentu yang berkontribusi guna membentuk citra negara atau menjelaskan keputusan kebijakan luar negeri kepada khalayak asing. Selama beberapa dekade terakhir, diplomasi publik menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri negara. Globalisasi dan teknologi baru membantu meningkatkan potensi dan jangkauan diplomasi publik. Meskipun fakta bahwa hubungan diplomatik antar negara selalu memiliki arti yang signifikan, diplomasi publik adalah fokus tidak hanya pada pengembangan hubungan diplomatik tradisional, tetapi juga mempengaruhi masyarakat negara dan, oleh karena itu, penting bagi pemerintah suatu negara. Jejaring sosial menciptakan peluang untuk berbagi informasi di mana saja di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa berbagai organisasi dan negara menggunakan jaringan tersebut sebagai fasilitator pelaksanaan diplomasi publik. Terlepas dari kenyataan bahwa twiplomasi menjadi semakin populer, hanya ada beberapa studi ilmiah yang berfokus pada penerapan twiplomacy dan peluang yang diberikannya. (Dumčiuvienė Aušra, 2016)

Memahami soft power apabila mengacu dari Nye (2008) yang dapat kita jumpai dalam artikelnya yang berjudul “Public Diplomacy and Soft Power” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616 (94). Soft power terutama berkaitan dengan tiga pilar sumberdaya kekuatan, yaitu kekuatan budaya (di berbagai ruang yang atraktif kepada pihak lain), kekuatan nilai-nilai politik (baik secara domestik maupun global), dan kekuatan kebijakan luar negeri (ketika kebijakan memiliki legitimasi dan pengaruh moral yang kuat) (Iqbal Muhammad, 2018).

Internet adalah hal yang tidak terpisahkan dengan manusia, terlebih semenjak wabah COVID-19 muncul, dimana pada masa ini kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari menjadi sangat dibatasi demi menghentikan penyebaran wabah virus COVID-19. Kehadiran internet menjadi hal yang tak bisa lepas karena lewat internetlah manusia dapat saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain melewati batas lintas negara, internet juga memberikan informasi yang selalu *up to date* mengenai kondisi dunia sepanjang wabah ini masih berlangsung. Kemudahan dalam mengakses berita melalui internet merupakan pilihan utama dari masing-masing individu, sebab *smartphone* lebih efisien penggunaannya dan selalu berada dalam gengaman atau didekat kita dibanding televisi.

Setelah ditemukannya komputer, membawa perubahan besar dalam konsep teknologi terutama sejak berakhirnya perang dunia kedua. Berkembang satu generasi teknologi computer Pertama yang terus meningkat sedikit demi sedikit. Hingga akhir 1990-an penamaan jaringan yang lebih luas dikenal dengan nama Internet. Komputer adalah fondasi dari semua perkembangan teknologi, melalui hal ini beberapa perusahaan komputer besar dunia telah menjadi pelopor Perkembangan teknologi seperti IBM, Microsoft, Intel, Macintos dan Apple. Pada akhir tahun 2000, komputer generasi keempat dengan peralatan utama memproduksi Mikroprosesor, kecepatan pemrosesannya sangat cepat, dan sampai saat ini kecepatannya terus meningkat. Perpaduan teknologi komputer dan komunikasi menjadikan

teknologi informasi memiliki berbagai macam kelebihan dalam pertukaran informasi ke seluruh belahan dunia, teknologi ini disebut internet dengan jaringan yang mendunia dan akses yang sangat cepat. Setiap individu dapat saling bertukar data dan informasi dengan jangkauan yang tidak terbatas, akses kegiatan dan aktivitas dapat dilakukan secara online dengan sarana ini (Danuri Muhammad, 2019)

Diplomasi digital mengacu pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama Internet dan inovasi diplomatik berbasis ICT. Sementara itu, diplomasi siber mengacu pada strategi untuk menangani berbagai masalah (seperti keamanan) yang muncul di dunia maya. Berbagai negara sering mengaitkan diplomasi digital dengan kegiatan diplomasi publik (misalnya, melalui penggunaan media sosial yang digencarkan). Aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, dan manajemen krisis yang terkait dengan diplomasi. Contohnya meski mengalami epidemic virus Zika pada 2015 dan 2016, pemerintah Brasil berhasil meyakinkan masyarakat internasional dengan menggunakan media sosial mengenai kesiapan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 dan Piala Dunia. Beberapa pakar kesehatan telah menyarankan Olympiade Rio 2016 ditunda atau dipindah. Namun Brasil cepat mengeluarkan pernyataan di situs web mereka dan akun media sosial dan di situs Olimpiade resmi bahwa mereka mencoba usaha terbaik untuk mengamankan kegiatan tersebut dari virus Zika (Prabandari Atin, Rahyaputra Viyasa, 2018)

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization) menyatakan wabah penyakit akibat COVID-19 sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Dalam perkembangannya, wabah penyakit COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China

pada Desember 2019, hingga April 2020 telah menyebar hingga ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. (Valerisha Anggia, Putra Marshell Adi, 2020) Lebih dari 940.000 orang telah meninggal dengan COVID-19 sejak wabah bermula di China akhir tahun lalu. Negara-negara yang paling parah terkena dampaknya adalah AS, India, dan Brasil, tapi ada lonjakan baru dalam infeksi di seluruh Eropa (BBC Indonesia, 2020)

Amerika merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduknya terserang wabah COVID-19 paling parah diseluruh dunia. Pemimpin Amerika Donald Trump, seringkali menyampaikan rasa tidak terimanya atas wabah ini terhadap China. Ia kerap memposting di media social yakni twitter dengan menyampaikan rasa tidak senangnya terhadap China karena telah membawa virus ini masuk ke seluruh dunia. Ia bahkan menyebut COVID-19 sebagai Chinese virus dalam cuitannya di twitter. Dikutip dari *South China Morning Post*, sudah sekitar delapan kali Donald Trump menggunakan “virus china” dalam cuitannya. Selama beberapa pekan, Pompeo secara terbuka mendukung teori virus corona yang sudah menulari lebih dari 1.4 juta penduduk AS berasal dari Institut Virologi Wuhan. Dia juga mengklaim dalam sebuah wawancara di awal Mei bahwa ada sejumlah bukti besar untuk membuktikan hal tersebut. Pompeo kemudian mengakui bahwa dia tidak bisa memastikan asal-usul virus dan tidak bisa membuktikan bahwa virus itu berasal dari sekitar laboratorium di Wuhan. Selain Pompeo, Presiden AS Donald Trump juga mengklaim bahwa ia telah melihat bukti yang menghubungkan wabah virus corona dengan laboratorium di Wuhan (CNN Indonesia, 2020)

Terbatasnya ruang serta berubahnya prosedur yang terjadi dalam dunia internasional akibat imbas dari pandemi COVID-19 membuat banyak pihak kesulitan untuk menjalin

hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal mengadakan kerjasama internasional. Alternatif lain yang dipraktekkan oleh setiap negara ialah dengan memanfaatkan sosial media, melalui cara ini negara-negara terkait dapat berpartisipasi ataupun memiliki sarana untuk menyampaikan pendapat serta informasi yang mereka miliki.

Kemampuan yang ditawarkan oleh media sosial dalam menyediakan kemudahan konektivitas, tidak hanya berkontribusi dalam politik internasional dan aktivitas sosial, tetapi juga mencakup upaya dunia internasional dalam penyelesaian isu-isu pemerintahan global dan antarnegara. Melalui media sosial duta besar, pejabat diplomatik, dan kementerian luar negeri mampu menyelesaikan tugas mereka secara lebih baik. Bagi suatu negara seperti China ini, motif yang dikejar ialah untuk mencapai kebijakan luar negeri mereka dan menampilkan citra positif dengan membuat laman, blog, ataupun penggunaan saluran media sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan lain sebagainya (Fitriah Putri Athifah, Haryanto Agus, 2017). Kenyataannya, China merupakan negara yang terbilang tidak ramah dengan kehadiran internet, bukan dalam artian menutup secara keseluruhan akses internet bagi warga negaranya, namun China membatasi beberapa social media yang terkenal seperti Google atau Google Play Store. Hal ini terjadi sejak tahun 2010, akses Google dan Google Play Store diblokir meskipun sebenarnya tetap bisa berfungsi namun harus melalui VPN. VPN berfungsi menutupi lokasi internet pengguna. Selain Google dan Google Play Store, China juga membatasi aplikasi Facebook, Twitter dan Instagram. Untuk menggantikan 3 sosial media tersebut, China menggantinya dengan Weibo. Weibo merupakan jejaring social yang terkenal di China, yakni kombinasi antara Facebook dan Twitter.

Ketika mengkaji bagaimana teknologi digital mempengaruhi pelaksanaan diplomasi publik, para akademisi dan praktisi seringkali memulai analisis mereka dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan diplomasi publik. Tujuan mereka adalah untuk memahami bagaimana teknologi digital memfasilitasi kegiatan diplomasi publik. Oleh karena itu, para

sarjana dapat fokus pada kemampuan media sosial untuk menghubungkan diplomat dengan populasi asing (Bjola & Jiang, 2015), penggunaan kedutaan virtual oleh diplomat untuk mengatasi keterbatasan diplomasi tradisional (Metzgar, 2012), dan Kementerian Luar Negeri (MFA) menggunakan data besar untuk mengukur opini publik di negara asing. Konseptualisasi tersebut menunjukkan bahwa praktik diplomasi publik tetap sama di era digital dan yang berubah hanyalah perangkat, metode, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi publik (Manor Ilan, 2018)

Di bidang diplomasi, media sosial dianggap sebagai sarana yang memungkinkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Media sosial juga dapat dengan mudah membuka ruang berinteraksi untuk mewujudkan kepentingan asing, dan kepentingan tersebut terkait dengan pembentukan kepentingan ekonomi, politik, budaya atau citra bangsa. Dengan menggunakan Twitter dalam kegiatan diplomasi, para diplomat akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan siapapun, termasuk mereka yang diyakini memiliki pendapat berbeda serta jangkauannya tak terbatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- Mengapa China mengimplementasikan twitter diplomasi terhadap Amerika Serikat pasca COVID-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui peran internet dalam praktik diplomasi modern
2. Menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebijakan pemerintah China
3. Menjelaskan apa itu twitter diplomasi dan keefektifannya sebagai wadah kepentingan nasional yang dilakukan oleh China

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk sebelumnya, maka guna memudahkan dalam mendeskripsikan dan memahami mengapa China mengimplementasikan twitter diplomasi terhadap Amerika Serikat pasca Covid-19, penulis menggunakan alat analisa berupa kerangka teoritis sebagai landasan pemikiran yang sesuai yakni konsep diplomasi digital dan diplomasi public.

##### **1. Diplomasi digital**

Menurut Corneliu Bjola dan Marcus Holmes, dalam buku "Digital Diplomacy: Theory and Practice" (2015), diplomasi digital disebut juga diplomasi elektronik, yang mengacu pada penggunaan ekstensif dari internet yakni teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu aktor dalam diplomasi public, mengakuisisi dan menganalisis informasi data. Dengan munculnya era digital, berbagai tindakan diplomasi bermunculan. Diplomasi digital terkait dengan platform pertukaran tentang bagaimana melakukan diplomasi. Bjola (2016) mengemukakan bahwa kata dalam diplomasi digital mengacu pada media berbasis Internet. Sedangkan diplomasi elektronik mengacu pada penggunaan media komunikasi berbasis elektronik seperti radio dan televisi, yang berbeda dengan bentuk komunikasi tradisional seperti surat.

Pemerintah dan organisasi internasional saat ini menyadari bahwa media sosial juga merupakan pengubah permainan yang potensial terhadap bagaimana hubungan internasional dapat dilakukan. Secara khusus, adopsi diplomasi digital, yang didefinisikan secara luas sebagai penggunaan media sosial untuk tujuan diplomatik, dapat mengubah praktik bagaimana diplomat terlibat dalam manajemen informasi, diplomasi publik, perencanaan strategi, negosiasi internasional atau bahkan manajemen krisis. (Bjola. C, 2015)

Terlepas dari janji yang ditawarkan diplomasi digital untuk pelaksanaan hubungan internasional, sedikit yang diketahui, bahwa dari perspektif analitis, bagaimana diplomasi digital bekerja, dengan tingkat keberhasilan apa, dan dimana letak keterbatasannya. Diplomasi digital mampu menyatukan para cendekiawan terkemuka dan diplomat berpengalaman untuk tujuan sistematis mengidentifikasi untaian penelitian yang berbeda tentang diplomasi digital dan membuatnya berbicara satu sama lain. Dengan kata lain, upaya untuk memahami sejauh mana digital diplomasi merupakan titik kritis dari bagaimana aktor internasional berinteraksi dengan satu sama lain sebagai lawan dari bentuk perlindungan status quo yang lebih halus. (Bjola. C, 2015)

Seperti bidang baru lainnya, studi diplomasi digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi para peneliti. Sisi ini dapat membuka investigasi yang belum diketahui tentang bagaimana digital teknologi terbentuk dan berpotensi mengatur ulang praktik diplomasi, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bidang penelitian baru ini mungkin melibatkan pertanyaan tentang bagaimana media sosial memengaruhi cara diplomat berkomunikasi satu sama lain atau dengan publik asing, bagaimana mereka mengambil keputusan. Di dalam kementerian, kedutaan, dan birokrasi mereka sendiri, bagaimana mereka membangun dan memelihara hubungan dengan aktor negara atau non-negara lain, atau bagaimana mereka menangani tantangan normatif yang didorong oleh perkembangan teknologi baru ini. (Bjola. C, 2015)

Di sisi lain, ada juga risiko bagi peneliti untuk ditarik ke terlalu banyak arah pada saat yang sama, sebuah fakta yang dapat mempengaruhi koherensi argumen secara keseluruhan dan berpotensi melemahkan signifikansi temuan teoritis dan empiris. Dengan adanya ketegangan ini, diplomasi digital diselidiki sebagai bentuk manajemen perubahan dalam politik internasional. Alih-alih berfokus secara terpisah pada bagaimana sosial media memengaruhi aspek-aspek diplomasi yang bijaksana (pengambilan keputusan, diplomasi publik, profesional norma dan sebagainya), Bjola memeriksa dua tema penting, inovasi kebijakan dan kelembagaan adaptasi, dimana media sosial menantang cara diplomasi dilakukan. Pada tingkat kebijakan, Bjola tertarik pada bagaimana media sosial memengaruhi fungsi inti diplomatik representasi, komunikasi dan manajemen hubungan. Di tingkat institusi, Bjola mengeksplorasi sejauh mana kementerian luar negeri mampu dan tertarik untuk menyesuaikan diri ke era media sosial. Kerangka kerja menyeluruh ini kemudian digunakan oleh kontributor untuk menjelaskan aspek penting dari hubungan antara teknologi digital dan diplomasi. (Bjola. C, 2015)

China melalui internet melancarkan aksi digital diplomasi nya dengan menggunakan social media yakni twitter. Aksi diplomasi ini dikenal dengan nama “twiplomacy” yang merupakan kepanjangan dari twitter diplomacy. Dalam pandemi COVID-19, masyarakat telah melihat pemerintah China aktif menggunakan media sosial Twitter untuk mendukung kepentingan nasionalnya, seperti berusaha membangun citra positif dan menyangkal klaim bahwa negaranya adalah sumber wabah. Dari akhir Januari hingga pertengahan April, akun @MFA\_China memposting lebih dari 200 tweet asli tentang pandemic dan ini tidak termasuk tweet dari akun diplomat China lainnya. Partisipasi pemerintah China di media sosial Twitter menunjukkan bahwa diplomasi digital dapat memberikan kontribusi nyata terhadap manajemen krisis dengan menyebarkan informasi kepada publik dan mendukung pertukaran

antar negara. Ini adalah hal yang benar ketika diplomasi tradisional seperti pertemuan tatap muka sulit dicapai dalam situasi pandemi seperti saat ini.

## **2. Diplomasi Publik**

Diplomasi public diklaim sebagai praktek yang sudah dilaksanakan sejak lama oleh negara-negara didunia, Cull (2009) mencatat bahwa term ini sudah digunakan semenjak tahun 1800-an. Dapat didefinisikan bahwa istilah ini digunakan dalam pemberitaan di London Times pada tahun 1856 dan pemberitaan di New York Times pada tahun 1871, walaupun pada waktu itu definisi diplomasi public tidak sepenuhnya sama dengan definisi yang digunakan pada saat ini. Popularitas istilah diplomasi public paska perang dunia diperkirakan muncul pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion. Menurut Cull, Gullion yang merupakan mantan Diplomat Amerika Serikat yang kemudian menjabat menjadi Dekan pada Fletcher School of Diplomacy, Universitas Tuft mengeluarkan istilah ini untuk pertama kalinya pada international information and cultural relations. Di klaim bahwa sejak saat itu penggunaan istilah diplomasi public lebih populer, menggantikan istilah propaganda yang digunakan untuk mendefinisikan kegiatan serupa sebelumnya. Karena term propaganda cenderung memiliki konotasi negative, maka istilah diplomasi public menjadi lebih mudah untuk diterima tanpa rasa curiga. (Trisni Sofia, 2020)

Sepanjang perkembangan konsep diplomasi public, definisinya berkembang menjadi lebih luas yang kemudian oleh Nicholas J. Cull dijelaskan bahwa diplomasi public adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan aktor-aktor internasional untuk mengelola lingkungan internasional guna mencapai internasionalisasi melalui interaksi dengan public internasional. Diplomasi public dipergunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara melalui pemahaman, penginformasian, serta mempengaruhi public internasional. Dengan

kata lain, jika prosedur diplomatic era tradisional dikembangkan berdasarkan mekanisme pemerintah ke pemerintah yang lain, maka diplomasi public cenderung dapat mencakup lebih luas hubungannya baik antara pemerintah dan rakyat, atau bahkan rakyat dengan rakyat. Tujuan utamanya tidak lain adalah agar public internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan social bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.

Menurut Christopher Ross, Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang seharusnya dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat memenuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik mancanegara (*to inform, engage, and influence*). (Hennida Citra, 2016)

Pertama, ada koordinasi kebijakan pada tatanan nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam, dan semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu negara. Untuk itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa publik mancanegara memahami kebijakan yang diambil. Harus dipastikan pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan yang lain. Koordinasi penting dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi jelas; pesan yang disampaikan adalah konsisten, dan sumber-sumber yang digunakan adalah efektif. Kedua, mesti ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. Ketiga, pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dapat dipercaya, dan benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran diplomasi publik adalah beragam. Maka, hal yang dapat diandalkan adalah kredibilitas. Keempat, menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik tertentu. Mengingat perkembangan ICT, maka pesan itu juga harus didesain secara cepat. Kelima, karena

kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti internet, *broadcasting*, publikasi cetak, *press placements*, *travelling speaker*, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Keenam, yakni memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor-sektor swasta dan aktor non-negara lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog. (Hennida Citra, 2016)

Berkaitan dengan konsep diplomasi public, China memanfaatkan twitter sebagai wadah mereka untuk mempromosikan citra negaranya terhadap public internasional. Pada awal pandemic, Twitter digunakan oleh China untuk membantah postingan Amerika bahwa negaranya sebagai negara yang menciptakan virus, namun China tidak hanya bergerak untuk membantah postingan Amerika, mereka juga memuat beberapa postingan tentang kerjasama China yangmana memberikan bantuan terhadap negara-negara lain yang terkena wabah COVID-19, selain itu tampak juga beberapa tagar dengan negara lainnya yang mereka ajak kerjasama seperti Maladewa lewat bantuan vaksin COVID-19, Afrika Selatan dengan bantuan Nucleic Acid Extraction pada tanggal 23 Januari, bantuan untuk Namibia berupa penyuplaian peralatan-peralatan ventilator dan oxygenerator, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan China guna menarik simpati public internasional dan memperbaiki citra negara mereka yang sebelumnya terkesan buruk berdasarkan postingan yang dilakukan oleh pihak Amerika, terutama Presiden yang menjabat saat itu (Donald Trump). Bahkan dalam beberapa postingan akun yang dikelola khusus untuk diplomat-diplomat China, secara terang-terangan membantah beberapa informasi yang merugikan negara mereka, selain itu para diplomat tersebut juga aktif dalam membahas isu internasional yang sedang terjadi.

#### **E. Hipotesa**

China mengimplementasikan twitter diplomasi terhadap Amerika Serikat pasca COVID-19 karena keefektifan dari diplomasi digital serta jangkauannya yang luas sehingga memungkinkan interaksi antara kementerian luar negeri maupun pejabat diplomatik lainnya dengan publik internasional.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap *in line* dengan judul yang telah disajikan, maka penulis menganalisis tentang upaya China dalam mengimplementasikan twitter diplomasi terhadap Amerika Serikat pasca COVID-19. Penulis memfokuskan penelitian sepanjang tahun 2019, dan mengutip sumber dimulai dari tahun 2002-2020, berkaitan dengan metode penelitian yang diambil.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana penulis menggunakan analisa yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menerjemahkan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Berdasarkan jenis penelitian maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data-data kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yang dimaksud adalah penulis menggunakan literature dan online research yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Data yang dikumpulkan ialah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan diplomasi digital dan diplomasi publik. Data dikumpulkan dari berbagai sumber contohnya dari *e-book*,

jurnal internasional, publikasi berita yang berkaitan dengan topik, serta website-website resmi yang ada di media social.

## **H. Sistematika Penulisan**

Didalam skripsi ini sistematika penulisan akan dibagi kedalam lima bab.

- **BAB I** akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada
- **BAB II** akan menjelaskan tentang wabah COVID-19 di China dan perkembangan penyebarannya
- **BAB III** akan berisi tentang diplomasi digital dan diplomasi public serta keefektifannya
- **BAB IV** akan membahas mengenai usaha China dalam memerangi pernyataan “negara penghasil virus” terhadap Amerika Serikat di twitter
- **BAB V** akan memuat tentang penutup dan kesimpulan